

ABSTRAKSI

Pelaksanaan Otonomi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan salah satu daerah yang masuk dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Pada 1 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU No 11/2006).

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pelaksanaan Otonomi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan di daerah Kabupaten Simeulue, serta apakah faktor-faktor Kebijakan Kelembagaan, dan Personil berperan dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam?

Metode dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data, menyusun, menginterpretasikan kedalam hal yang sebenarnya sehingga dapat menghasilkan gambaran yang jelas, terarah dan menyeluruh dari masalah yang menjadi objek penelitian.

Penentuan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling purposive* yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 orang dan dari 40 orang sampel tersebut juga merupakan key informan sebanyak 1 orang.

Kata kunci

1. Otonomi Khusus
2. Dinas Kelautan dan Perikanan
3. Kebijakan, Kelembagaan, Personil